



Tunjangan Rumah DPR Jadi Sorotan

**Dianggap
Bebani
Keuangan
Negara**

JAKARTA - Rencana Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memberikan tunjangan perumahan bagi wakil rakyat menuai sorotan. Transparency International Indonesia (TII) menyebut kebijakan itu punya kerentanan. Salah satunya berpotensi membebani keuangan negara.

Peneliti TII, Alvin Nicola mengatakan, wacana yang sejatinya sudah digagas cukup lama itu harus betul-betul melalui kajian yang komprehensif. Salah satunya mengomparasikan biaya perawatan rumah jabatan anggota (RJA) saat ini dengan beban biaya sewa yang akan diberlakukan.

Alvin mencontohkan, jika rata-rata biaya sewa rumah di sekitar Gedung DPR di Senayan, Jakarta Selatan adalah Rp 500 juta per tahun per anggota, maka dalam lima tahun anggaran yang diperlukan sebesar Rp 1,45 triliun. "Maka, jelas akan terjadi pemborosan anggaran," kata

Alvin, kemarin (5/10).

Peneliti Themis Indonesian Ibnu Syamsu Hidayat menambahkan, Setjen DPR harus melihat sejauh mana efektivitas kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi wakil

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

Tunjangan Rumah DPR Jadi Sorotan

rakyat. Sebab, jika ditelisik lebih jauh, banyak anggota DPR yang juga punya rumah di Jakarta dan sekitarnya.

"Harus ada indikator yang jelas. Kalau yang sudah punya rumah di Jakarta, ya mestinya tidak perlu sewa," ujarnya.

Selain itu, standardisasi besaran sewa rumah juga harus dikaji secara mendalam. "Jadi, harus jelas standar yang dipakai apa agar tidak terjadi pemborosan anggaran," ujarnya.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar sebelumnya mengatakan bahwa anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti dengan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan.

Indra mengatakan hal tersebut merupakan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI beserta fraksi-fraksi partai politik sebelum pelantikan anggota periode baru. Rumah dinas yang selama ini ditempati para wakil rakyat itu akan dikemba-

likan kepada negara.

"Kami saat ini sedang menyiapkan berbagai dokumen untuk menyampaikan kepada Kementerian Keuangan, juga bersama Kementerian Sekretariat Negara, berkaitan dengan pengembalian aset negara tersebut," kata Indra.

Ia mengatakan selama ini rumah dinas yang ditempati anggota DPR RI sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian karena sebagian besar kondisi rumah dinas itu sudah cukup parah dan tidak layak ditinggali.

"Kondisinya sudah sebagian sangat parah, tetapi juga ada anggota dewan yang memang dengan anggarannya sendiri memelihara sehingga ada juga yang kondisinya masih cukup baik," katanya.

Selain itu, pihaknya sejauh ini masih mengidentifikasi biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, bahkan di wilayah Jabodetabek, untuk bisa menentukan angka tunjangan yang ideal bagi para anggota DPR RI.

Fasilitas rumah yang akan menjadi indikator tun-



jangan itu di antaranya hunian yang sangat layak dan memiliki tiga kamar.

Indra berjanji akan melakukan kajian secara hati-hati dalam menentukan besaran tunjangan perumahan. Karena itu, Setjen DPR akan menggandeng tim appraisal untuk menentukan besarnya. "Kami ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan tiga kamar itu *rate*-nya berapa?" katanya.

Tunjangan perumahan akan masuk dalam komponen gaji. Sejauh ini, menurut dia, tunjangan-tunjangan bagi para Anggota DPR RI belum ada perubahan atau peraturan baru. Semua tunjangan bagi wakil rakyat itu masih mengacu pada peraturan lama, termasuk hak-hak keuangan.

Indra juga mengatakan bahwa Pimpinan DPR RI tidak akan mendapatkan tunjangan rumah dinas karena bakal

masih menggunakan rumah dinas yang berada di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.

Sedangkan Anggota DPR RI periode 2024-2029 lainnya akan mendapatkan tunjangan tersebut karena tidak akan mendapatkan rumah dinas.

"Pimpinan DPR, berdasarkan surat Kementerian Keuangan ke kami, itu tidak mendapat tunjangan," kata Indra.

Sudah beredar sejak Kamis (3/10) mengenai Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota DPR. Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinas masing-masing.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mendapat kabar perihal pimpinan DPR RI akan tetap mendapatkan

rumah dinas

Dia mengaku telah mengembalikan rumah dinas pimpinan DPR RI masa jabatan 2019-2024 sebelum pelantikan DPR RI periode 2024-2029 dilakukan pada 1 Oktober.

"Saya belum dikasih tahu justru karena saya kebetulan memang sudah mengembalikan dan sampai saat ini tinggal di rumah sendiri," ucap Dasco yang kembali duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI untuk kedua kalinya itu.

Adapun pembicaraan terkait tunjangan-tunjangan lainnya, dia menyebut kemungkinan baru akan dibahas pekan depan mengingat anggota dan pimpinan DPR RI periode 2024-2029 baru saja dilantik.

"Baru minggu depan kemungkinan kita akan membicarakan hal-hal yang lain yang harusnya dibahas," kata dia. (*tyo/ant/c17/ttg*)